

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba. 2022. *Hukum Perusahaan*. Kencana. Jakarta.
- Ahmadi Miru. 2018. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing. Surabaya.
- Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. 2022. *Buku Pedoman: Kurator dan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia*. Jakarta.
- Elyta Ras Ginting. 2018. *Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hadi Subhan. 2019. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana. Jakarta.
- Imran Nating. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Man S Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni. Bandung.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram NTB. Mataram University Press.
- Munir Fuady. 2017. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.

- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2002. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju. Bandung.
- Rio Christiawan. 2020. *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapannya*. Kencana. Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Kencana. Jakarta.
- Tami Rusli. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. UBL Press. Lampung.
- Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Ideas Publishing. Gorontalo.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Firmansyah. 2013. *Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit (Studi Kasus Terhadap Apartemen Dan Ruko Palazzo Jakarta)*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Andi Ari Setiawan Amrullah. 2023. "Analisa Asas Terang dan Tunai dalam Investasi Saham Pada Perseroan Terbatas (Tertutup)". *Jupendis : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*. Volume 1. Nomor 3.
- Bernanti Aryajayaputri dan Mohamad Fajri Mekka Putra. 2022. "Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Pakuan Law Review*. Volume 8. Nomor 1.
- Darren Andreas dan Ariawan. 2023. "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Volume 7 Nomor 1.
- Dwi Handayani. 2020. "Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 14

Nomor 2.

Hadi Subhan. 2020. "*Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha*" *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 50. Nomor 2.

Hadi Subhan. 2022. "*Karakteristik Hukum Kepailitan Indonesia dan Perkembangannya Sebagai Instrumen Hukum Recovery Pembayaran Utang Debitor*". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Jodi Ghozali dan Nizi Kusuma Wardani. 2023. "*Kajian Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*". *Jurnal Commerce Law*. Volume 3 Nomor 1.

Kondios Mei Darlin Pasaribu. 2021. "*Penerapan Hukum Terhadap Tidakhadiran Tergugat Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan (Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN. Tbt)*". *Law Jurnal* Volume 2. Nomor 1.

Mohammad Maulana Kusuhmawardhana, Helwan Kasra, dan Serlika Aprita. 2023. "*Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata Dalam Agenda Pembuktian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 80/Pdt.G/2020/PN/ Plg)*". *Jurnal Rectum*. Volume 5 Nomor 3.

M Hadi Subhan. 2020. "*Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesia Legal System*". *Richtmann Publishing*. Volume 9. Nomor 2.

Prayogo Hindrawan , Sunarmi, Budiman Ginting. 2023. "*Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*". *Locus Journal of Academic Literatyre Review*. Volume 2 Nomor 8.

Raudhea Vara Yulfa Chairy. 2023. "*Implikasi Normatif Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perseroan Perorangan sebagai Reformasi Hukum Bisnis di Indonesia*". *Utari Kayu Institute*. Volume 4 Nomor 4.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Herziene Indlandsch Reglement*)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sumber Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. Pada KBBI Daring. Diakses 25 Juli 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pailit>